



LAPORAN HASIL PENELITIAN

IDENTIFIKASI PRODUK UNGGULAN JAWA TENGAH DALAM RANGKA  
PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI PENDAFTARAN HKI

Oleh

L. TUKAN LEONARD,SH,MA  
Dan Tim

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
2001

---

DIBIAYAI OLEH DANA APBD PROPINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2001

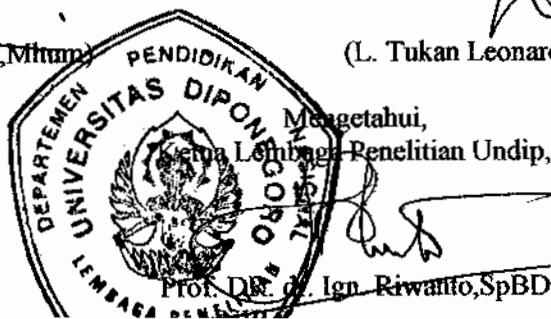
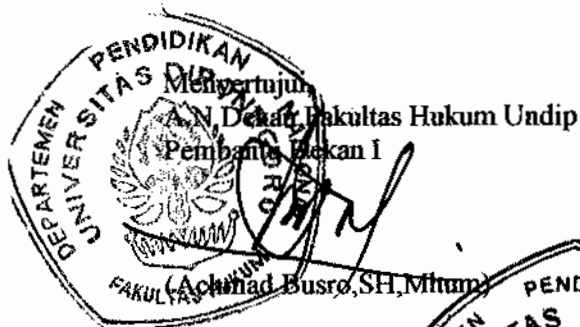
## LAPORAN HASIL PENELITIAN

- 
1. Judul Penelitian : Identifikasi Produk Unggulan Daerah  
Jawa Tengah Dalam Rangka  
Perlindungan Hukum HKI Melalui Pendaftaran
2. KEPALA PROYEK PENELITIAN :
- a. Nama : L. Tukan Leonard,SH,MA
  - b. NIP : 131 682 453
  - c. Pangkat dan Golongan : Lektor Kepala / IV A
  - d. Lembaga/Instansi : Fakultas Hukum Undip
  - e. Pengalaman dalam bidang Penelitian:
    - 1. ,,,
    - 2. ,,,,
    - 3. ,,,,
    - 4. ,,,
    - 5. ,,,,
  - f. Sedang Melakukan Penelitian : Tidak
- 
3. Tempat Penelitian : Seluruh Wilayah Propinsi Jawa Tengah
- 
4. Jangka Waktu Penelitian : 12 (Dua Belas) Bulan
- 
5. Dibiayai Melalui Proyek : APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun  
Anggaran 2001
- 
6. Biaya Penelitian : Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta  
Rupiah)
- 

Semarang, Desember 2001

Peneliti,

(L. Tukan Leonard,SH,MA)



## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Personalia	iii
Daftar Isi	iv
Prakata	v
Bab I : Rencana Kegiatan	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Kegiatan	5
D. Langkah Program	6
Bab II : Hasil Kegiatan	8
A. Registrasi HKI Produk Unggulan Daerah	8
B. Gambaran Umum	8
C. Laporan Hasil Registrasi Produk Unggulan Daerah	14
D. Profil Pengusaha Yang Dibantu	17
E. Profil Pengusaha Dilihat dari Aspek Kriteria Unggulan	28
F. Data Kasus HKI di Beberapa Kabupaten/Kota	45
Bab III : Kesimpulan dan Rekomendasi	64
Daftar Referensi	69

# PRAKATA

Proyek Perlindungan Hukum Hak kekayaan intelektual atas produk-produk unggulan daerah Jawa Tengah merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tidak lain merupakan salah satu bentuk langkah nyata pemerintah propinsi untuk melindungi produk unggulan Jawa Tengah dalam era perdagangan bebas agar mampu memberikan nilai lebih dan daya saing yang cukup dalam globalisasi perdagangan. Langkah ini tentunya hanya merupakan langkah awal dari sekian banyak langkah lain di dalam upayanya melindungi produk unggulan Jawa Tengah dari sisi HKI. Untuk itu, apa yang telah dihasilkan dari proyek ini dapat dijadikan dasar penentuan kebijakan lebih lanjut untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan upaya melindungi produk unggulan daerah dari sisi HKI, karena pada dasarnya upaya memberikan perlindungan atas produk unggulan tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya.

Di dalam menyelesaikan proyek ini tim telah mendapatkan bantuan dari banyak pihak yang telah berkenan membantu, untuk itu diucapkan banyak terima kasih pada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Tengah;
2. Ketua dan anggota Komisi A DPRD Propinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Gubernur bidang Perekonomian dan Pembangunan;
4. Kepala Biro Hukum Propinsi Jawa Tengah beserta staf;
5. Kepala Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah;
6. Seluruh Kepala Kantor Dinas Perindustrian perdagangan dan Koperasi di Jawa Tengah
7. Dekan Fakultas Hukum UNDIP Semarang;
8. Rekan Dosen Fakultas Hukum UNDIP Semarang;
9. Berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu – persatu.

Tim pelaksana menyadari bahwa laporan akhir ini kemungkinan masih mengalami kekurangan di beberapa sisi, untuk itu kritik dan saran selalu terbuka untuk penyempurnaan laporan.

Akhir kata semoga laporan akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berminat dan pihak yang mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan di bidang HKI yang berkaitan dengan Produk unggulan daerah.

Semarang Nopember 2001

Tim Pelaksana

## BAB I

### Rencana Kegiatan

#### A. Latar Belakang

Propinsi Jawa Tengah terletak di bagian tengah Pulau Jawa, dengan luas sekitar 3,25 juta Km<sup>2</sup> atau 1,7% dari luas wilayah Indonesia, dengan jumlah penduduk sekitar 29,9 juta jiwa, atau 15% dari jumlah penduduk Indonesia dengan jumlah kepadatan 919 orang per km<sup>2</sup>.

Propinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7932 desa dan 6 kota yang meliputi 606 kelurahan. Dari segi perekonomian, realisasi penerimaan anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Tengah selama dua tahun anggaran terakhir cenderung menunjukkan peningkatan, yakni dari Rp. 510 milyar pada Tahun anggaran 1997/1998 menjadi Rp. 588,4 milyar pada Tahun Anggaran 1998/1999. Peningkatan terbesar justru bersumber pada Pos Sumbangan dan Bantuan.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) terhadap APBD Propinsi Jawa Tengah sangat besar. Hal tersebut terlihat jelas dari kontribusi PAD terhadap APBD Propinsi Jawa Tengah pada tahun Anggaran 1996/1997 dan 1997/1998 yang mencapai 67%, tetapi kemudian mengalami penurunan pada tahun anggaran 1998/1999 menjadi 42%. Adapun kontribusi Pos Sumbangan dan Bantuan pada Tahun Anggaran 1996/1997 dan 1997/1998 relatif kecil yaitu kurang dari 15%, namun pada Tahun Anggaran 1998/1999 mengalami kenaikan yang cukup tajam hingga mencapai sekitar 47% bahkan melebihi kontribusi PAD terhadap APBD Propinsi Jawa Tengah.

Dalam struktur PAD, bagian terbesar justru berasal dari pajak daerah yang memberikan kontribusi mencapai lebih dari 80% pada Tahun Anggaran 1996/1997. Angka tersebut mengalami penurunan hingga menjadi 78% pada tahun anggaran 1997/1998 yang disebabkan karena terjadi peningkatan kontribusi Penerimaan lain-lain. Dalam ralisasinya situasi krisis ekonomi telah menyebabkan hilangnya sebagian besar sumber PAD. Pada Tahun Anggaran 1998/1999 ralisasi penerimaan PAD hanya mencapai 245 milyar, jika dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya telah terjadi penurunan sebesar 33% (Rp. 119 milyar). Penurunan tersebut yang terbesar terjadi karena penurunan penerimaan pada sektor pajak BBNKB sebesar 109 milyar.

Dengan diberlakukannya UU, no. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah juga menjadi penyebab turunnya PAD Propinsi Jawa Tengah, karena adanya penghapusan dan pengalihan beberapa jenis retribusi daerah yang diperkirakan mencapai 30 milyar. Penurunan PAD berdampak pada penurunan APBD yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan daerah untuk membiayai program-program pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu segala upaya perlu dilakukan untuk memulihkan kembali kondisi tersebut program-program pembangunan daerah yang telah direncanakan dapat dilaksanakan. Hal tersebut dapat ditempuh dengan memaksimalkan potensi daerah yang ada guna memupuk PAD tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.

Dalam kenyataannya globalisasi yang sedang berlangsung tidak hanya menuntut perubahan dan penyesuaian di tingkat nasional tetapi bahkan sampai tingkat daerah termasuk daerah Jawa Tengah. Perubahan sikap internal daerah Jawa Tengah dalam menyikapi perubahan yang ada adalah dengan memupuk sikap kemandirian wilayah Jawa Tengah sehingga mampu bersaing dengan daerah lain. Hal ini tentu saja harus didukung dengan peningkatan daya saing (*comparative advantage*). Daya saing yang

diharapkan mampu menjadi andalan Jawa Tengah adalah daya saing yang berbasis pada potensi produk - produk unggulan Jawa Tengah yang terdiri dari sektor pertanian dan non pertanian yang tersebar diberbagai Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

Persoalan mendasar yang harus dilakukan adalah memberikan perlindungan hukum yang relevan agar produk unggulan tersebut tidak begitu saja dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak berhak untuk suatu kepentingan komersial, yang pada gilirannya akan mampu memberikan nilai ekonomis baik secara individual maupun secara regional yaitu pada peningkatan PAD Propinsi Jawa Tengah.

Secara yuridis, bidang hukum yang relevan untuk memberikan perlindungan hukum atas produk unggulan Jawa Tengah adalah Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang mencakup bidang Paten, Merek dan Hak Cipta, desain industri, Rahasia Dagang, Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Persaingan tidak Sehat. Bidang - bidang yang mempunyai relevansi yang dekat dalam memberikan perlindungan bagi produk unggulan Jawa tengah tersebut adalah :

#### 1. Merek,

khususnya indikasi geografis dan indikasi asal barang sesuai dengan pasal 79 A Undang - undang no. 19 tahun 1992 , indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografisnya termasuk didalamnya faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi daripadanya. Keduanya memberikan ciri dan kualitas barang yang dihasilkannya.

Indikasi geografis mendapatkan perlindungan hukum apabila didaftarkan. Permohonan pendaftaran dapat diajukan oleh :

- Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang tersebut yang pada intinya terdiri dari :



- ❖ pihak yang mengusahakan barang tersebut yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam setempat
- ❖ produsen barang hasil pertanian
- ❖ pembuat barang kerajinan tangan atau hasil industri
- ❖ pedagang yang menjual barang tersebut
- ❖ Lembaga yang diberi wewenang untuk itu
- ❖ kelompok konsumen barang tersebut

## 2. Hak Cipta.

Hak ini memberikan perlindungan atas ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pada dasarnya ciptaan yang dilindungi hak cipta telah disebutkan secara limitatif dalam UUHC. Misalnya : buku, program komputer, lagu, seni rupa (lukis, gambar, seni ukir, pahat patung dan kerajinan tangan) arsitektur dan sebagainya. Namun demikian untuk hak cipta tidak ada keharusan untuk mendaftarkan haknya guna mendapatkan perlindungan hukum atas hak tersebut. Sebaliknya hak tersebut timbul secara otomatis pada saat karya ciptaan itu dihasilkan. Namun untuk pembuktian di Pengadilan jika terjadi suatu sengketa tentang hak maka pendaftaran masih dianggap penting untuk hak cipta.

## 3. Paten.

Hak ini diberikan oleh negara pada seseorang yang temuannya memiliki ciri inovatif atau memiliki kebaruan dan mengandung langkah inventif (*inventive steps*) dan dapat diterapkan dalam industri. Dengan demikian temuan tersebut merupakan karya baru di bidang teknologi yang memiliki kebaruan dan dapat diaplikasi di dalam industri. Artinya karya teknologi tersebut harus memiliki nilai ekonomis untuk dikembangkan. Bila tidak cukup nilai ekonomisnya, maka karya teknologi tersebut meskipun memiliki ciri



kebaharuan, tidak diperlukan untuk pendaftaran. Pendaftaran atas hak ini sama seperti merek adalah suatu keharusan

Dengan demikian, keberhasilan pemberian perlindungan hukum bagi produk - produk unggulan Jawa Tengah baik di bidang pertanian maupun non pertanian pada akhirnya diharapkan akan mampu meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) dalam perdagangan dan sekaligus akan menciptakan keunggulan komparatif produk tersebut di pasar global.

#### **B. Perumusan Masalah :**

Guna mendapatkan suatu arah yang jelas dalam kegiatan identifikasi produk unggulan dalam kaitannya dengan upaya pemberian perlindungan hukum HKI tersebut, maka beberapa permasalahan yang patut dikemukakan adalah sbb :

1. Bentuk produk unggulan Jawa Tengah yang bagaimanakah yang mempunyai potensi bersaing di pasar global ?
2. Bentuk perlindungan hukum yang bagaimanakah yang dapat memberikan perlindungan terhadap produk unggulan Jawa tengah tersebut. ?
3. Bagaimanakah. Penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat biaya murah dan memberikan rasa keadilan bagi pihak - pihak.

#### **C. Tujuan Kegiatan**

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi produk unggulan Jawa Tengah yang mempunyai potensi bersaing di pasar global.
2. Untuk mengetahui dan menetapkan perlindungan hukum atas HKI yang tepat terhadap produk unggulan jawa tengah
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa HKI yang sederhana, cepat biaya murah dan memberikan rasa keadilan bagi pihak - pihak

#### D. Langkah Program

1. Inventarisasi/identifikasi potensi produk unggulan Jawa Tengah menuju pemberian perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah :
  - Koordinasi dengan pihak-pihak terkait (DPRD Jawa Tengah, khususnya Komisi A yang menangani bidang hukum, DPRD provinsi Tengah, serta khuk HKI Fakultas Hukum Undip) dalam kegiatan mengidentifikasi potensi HKI pada produk-produk unggulan Jawa Tengah terutama, khususnya pada sentra-sentra yang potensial di 35 kabupaten yang ada di Jawa Tengah.
  - Penentuan skala prioritas produk-produk mana yang berpotensi HKI guna mendapatkan perlindungan HKI melalui proses pendaftaran haknya. Jumlah anggaran yang tersedia menjadi pertimbangan penyusunan skala prioritas baik atas daerah kabupaten yang akan diidentifikasi maupun potensi HKI dari kabupaten tsb.
  - Penyediaan perlengkapan/sarana pendukung pelaksanaan identifikasi baik berupa alat penelitian (kues, panduan wawancara, buku pengamatan) maupun data sekunder yang telah ada.
2. Kunjungan Lapangan
  - Kunjungan pada 35 kabupaten atau pada kabupaten yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan skala prioritas tersebut. Dalam kunjungan ini dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemda Kabupaten dan Deperindag setempat guna memperoleh hasil yang diharapkan.
  - Pelaksanaan identifikasi potensi HKI atas produk unggulan guna tindak lanjut pendaftaran atau registrasi HKI-nya.

### 3. Pembuatan Laporan Hasil Identifikasi

Pada tahap ini data yang diperoleh selanjutnya diolah untuk menentukan produk unggulan mana yang harus ditindak lanjuti dengan permohonan pendaftaran HKI-nya. Sedangkan terhadap data yang terkait dengan permasalahan dan tujuan kegiatan yang ketiga selanjutnya diolah/dianalisis sehingga tercipta Model kerjasama dari pihak-pihak terkait untuk mewujudkan kemandirian Jawa Tengah yang berbasis pada produk unggulan Jawa Tengah.

### 4. Infentarisasi dan identifikasi kasus - kasus HKI yang ada di 35 kabupaten di Jawa Tengah dilanjutkan dengan mencari upaya penyelesaian atas kasus - kasus tersebut baik secara litigasi maupun non litigasi.

### 5. Pelaksanaan registrasi ke Ditjend HKI

- Melakukan pengecekan ke ditjend HKI sebelum dilakukan pendaftaran
- Menyiapkan dokumen - dokumen yang diperlukan untuk registrasi
- Penyampaian permohonan registrasi ke Ditjen HKI

## BAB II

### HASIL KEGIATAN

#### A. REGISTRASI HKI PRODUK UNGGULAN DAERAH

Laporan mengenai hasil registrasi produk unggulan daerah di 35 kabupaten /Kota di Jawa Tengah ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Jakarta merupakan hasil tindak lanjut pengumpulan data primer di 35 Kabupaten/Kota dan merupakan hasil konsultasi dengan Kantor Perindustrian Perdagangan dan Koperasi di daerah yang dianggap paling mengetahui keberadaan pengusaha yang bergerak di sektor unggulan atau andalan bagi daerah yang bersangkutan. Laporan ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu : *gambaran umum pelaksanaan kegiatan, laporan hasil registrasi di Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual di Jakarta ,serta profil pengusaha yang dibantu pendaftaran HKI nya.*

#### **B. Gambaran Umum**

Berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah No.512/73/2000 Tanggal 26 Desember 2000 terdapat 16 jenis produk unggulan daerah Jawa Tengah, yaitu

- a.Meubel (kayu/rotan)
- b.Ukiran kayu/meubel;
- c.Kerajinan rambut;
- d.Batik;

e. Barang dari kulit;  
f. Barang kuningan;  
g. Benda keramik;

j. barang logam;

k. Tatah Sungging;

l. Teh

m. Pisang;

n. Kacang asin;

o. Tekstil.

p. Keramik.

Produk unggulan daerah tersebut tersebar di berbagai kota/Kabupaten di Jawa Tengah dan melibatkan banyak pengusaha yang terlibat dalam satu produk unggulan daerah, dengan demikian *kesulitan pertama* yang dihadapi adalah memilih satu/dua pengusaha yang bergerak di sector unggulan daerah dari sekian banyak pengusaha yang terlibat di dalamnya. *Kesulitan lain* yang seringkali muncul adalah berbedanya persepsi mengenai produk unggulan daerah antara apa yang telah tertuang dalam SK Gubernur Jawa Tengah dengan apa yang ada di daerah Kota/Kabupaten, tidak jarang Kantor Perindagkop di Kota atau Kabupaten mempunyai versi sendiri dalam menyebut produk unggulan daerah. Dengan demikian jalan tengah yang

diambil peneliti adalah pada tahap pertama menetapkan dan mencari pengusaha yang bergerak di sector unggulan daerah sesuai dengan SK Gubernur namun apabila di daerah yang tidak terdapat produk unggulannya maka akan digunakan produk unggulan versi Kantor Perindagkop setempat yang lebih memahami kondisi didaerahnya masing-masing.

*Penyebaran diberbagai kota/Kabupaten atas satu produk unggulan* juga menyulitkan penentuan pengusaha yang akan dinominasikan untuk dibantu perlindungan hakinya, hal tersebut dikarenakan keterbatasan jumlah pengusaha yang akan dibantu perlindungan Hakinya, yaitu hanya dua(2) pengusaha untuk setiap Kabupaten/Kota.

Berikut daftar mengenai produk unggulan daerah beserta lokasi dan jumlah perusahaan yang terlibat di dalamnya menurut Sk Gubernur Jawa tengah ;

No	KOMODITI	JML INDUSTRI	LOKASI
1.	Meubel	37	Kodya semarang,Kendal,Jepara,Boyolali
			Karanganyar,Sukoharjo,Kab Magelang
2.	Ukiran kayu/Rotan	59	Semarang,Sukoharjo, Klaten,Purworejo

			Karanganyar, Salatiga, Magelang, Demak, Jepara, Purbalingga.
3.	Kerajinan Rambut	10	Purbalingga
4.	Batik	4	Sukoharjo, Pekalongan, Surakarta
5.	Keramik	7	Banjarnegara
6.	Barang dari kulit	5	Kabupaten Semarang, Kab Tegal
7.	Barang kuningan	2	Pati
8.	Bordir	2.763	Kudus, Tegal
9.	Garmen	11	Semarang, Boyolali, Batang
10.	Rokok	3	Kudus
11.	Barang logam	73	Klaten dan Tegal
12.	Tatah Sungging	20	Sukoharjo
13.	The	20	Wonosobo, Pekalongan, Tegal, Blora, Pemalang, Batang
14.	Pisang	3	Cilacap, Blora, Brebes, Grobogan
15.	Kacang asin	4	Pati
16.	Tekstil	26	Batang, Salatiga, Kab Tegal, Boyolali, Kudus, Semarang, Sukoharjo, Surakarta



Berdasarkan hasil pemantauan dilapangan maka *tidak semua produk unggulan daerah memerlukan bantuan perlindungan hukum*, hal tersaebut dikarenakan terdapat beberapa produk unggulan yang *telah berskala besar dan telah ditata dengan menejemen professional dengan demikian telah dilindungi HKInya sejak lama, seperti halnya produk meubel, rokok,kacang asin, dan garmen*. Pengusaha yang terlibat dalam produk unggulan tersebut adalah perusahaan besar yang telah berskala nasional dengan pangsa pasar ekspor, dengan demikian umumnya telah melakukan perlindungan atas merek, paten, maupun hak cipta yang terlibat dalam produknya. Berdasarkan fakta ini maka program perlindungan produk unggulan daerah diarahkan terutama pada industri kecil dan menengah yang belum melindungi produknya dengan HKI.

- Hasil akhir kegiatan identifikasi produk unggulan daerah di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah adalah berupa pendaftaran produk unggulan tersebut ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Jakarta dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang memadai atas produk tersebut. Namun demikian dalam kenyataannya upaya tersebut bukan merupakan pekerjaan yang mudah dan dapat selesai dalam waktu yang singkat, hal itu dikarenakan kendala yang dihadapi di lapangan ternyata banyak dan beraneka ragam yang masing-masing memerlukan pemecahan sendiri-sendiri. Beberapa hambatan tersebut antara lain :
- Sebagian besar peneliti adalah dosen pada fakultas Hukum UNDIP Semarang yang mempunyai tugas dan kewajiban lain di samping tugasnya sebagai

peneliti dalam kegiatan ini sehingga tidak dapat diharapkan harus mencurahkan seluruh waktu untuk penelitian ini, hal ini berakibat penanggung jawab (dalam hal ini team kecil) harus menyelesaikan sendiri semua urusan yang belum terselesaikan oleh peneliti yang lain, dilain pihak pendanaan untuk kegiatan tersebut semakin sedikit dikarenakan telah digunakan pada tahap awal kegiatan.

- Persepsi pengusaha yang akan dibantu pendaftaran HKInya beraneka ragam, tidak jarang berubah pikiran setelah tiba waktunya memenuhi persyaratan formal yang dibutuhkan untuk pendaftaran HKI, hal ini berakibat team kecil harus mencari calon pengganti lain yang tentunya berakibat pada tidak sesuainya dengan program yang dijadwalkan serta bertambahnya anggaran untuk kepentingan penelitian lapangan dan koordinasi dengan instansi terkait.
- Kriteria yang berbeda-beda mengenai produk unggulan daerah tidak jarang membingungkan dilapangan. Perbedaan tersebut sangat berpengaruh dalam menentukan nominasi pengusaha yang bergerak di sector unggulan daerah yang akan dibantu pendaftaran HKInya secara cuma-cuma.
- Pengusaha yang bergerak disektor unggulan daerah sesuai dengan criteria daerah telah banyak yang memperoleh perlindungan HKInya atau banyak pengusaha yang enggan memperoleh perlindungan HKI secara gratis berakibat harus dicari pengusaha lain yang bergerak disektor lain yang

ranking unggulannya berada di bawahnya, hal ini berakibat mundurnya waktu serta bertambahnya budget.

- UKM yang dinominasikan dan berminat untuk dibantu pendaftaran HKInya dan merupakan andalan daerah tidak jarang telah terbiasa melakukan bisnisnya dengan melanggar /menyerempet pelanggaran HKI pihak lain sehingga tidak jarang gagal atau harus berganti merek lain pada saat pemeriksaan awal di kantor merek di Jakarta.

#### **④ . LAPORAN HASIL REGISTRASI PRODUK UNGGULAN DAERAH (PUD)**

Sesuai dengan rencana yang tertuang dalam kontrak maka direncanakan akan didaftarkan sejumlah 70(tujuh puluh produk unggulan daerah di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk dibantu pendaftaran HKInya . dari hasil identifikasi lapangan hampir 6 bulan telah berhasil dipersiapkan dan didaftarkan 70 (Tujuh Puluh ) pengusaha dari 35 kabupaten/Kota untuk didaftarkan HKInya dengan perincian masing-masing Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua ) pengusaha yang terutama bergerak pada sector yang merupakan unggulan atau andalan daerah yang bersangkutan.

Dari hasil registrasi dapat dilaporkan bahwa bidang HKI yang didaftarkan *terdiri dari 69 (Enam Puluh Sembilan) berupa permohonan pendaftaran*

*Merek dan 1 (satu ) berupa permohonan pendaftaran Paten sederhana.*

Pertimbangan utama memilih merek dikarenakan sebagian besar produk tersebut berupa barang yang diperdagangkan pada konsumen dengan menggunakan merek tertentu yang perlindungan atas merek tersebut baru ada apabila didaftarkan. Sedangkan 1 (satu ) paten sederhana yang diajukan permohonan pendaftarannya berupa alat/mesin perajang daun tembakau yang sangat dibutuhkan dan menjadi andalan utama daerah asal, yaitu Kabupaten Temanggung. Registrasi merek dilakukan dengan melalui tahap searching terlebih dahulu yaitu suatu tahap untuk mencari informasi mengenai merek yang akan didaftarkan telah digunakan oleh orang lain atau belum. Searching ini sangat bermanfaat karena mengurangi risiko ditolaknya merek pada tahap selanjutnya pemeriksaan merek serta bermaksud menghemat biaya pendaftaran (Rp.450,000 per merek ) yang tidak dapat ditarik kembali apabila merek yang didaftarkan ditolak oleh Kantor merek di Jakarta.

Beberapa kendala yang dihadapi dilapangan yang berkaitan dengan upaya registrasi PUD tersebut antara lain :

- a. terlambatnya pemenuhan persyaratan yang dipersyaratkan untuk pengajuan pendaftaran HKI oleh pengusaha yang dinominasikan untuk dibantu pendaftaran HKInya. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain : sebagian besar pengusaha adalah UKM yang sebagian besar produknya dikemas dalam plastik atau kain, padahal persyaratan pendaftaran harus tercetak di atas kertas

putih, tidak atau belum dimilikinya NPWP yang dalam hal tertentu sebagai syarat permohonan pendaftaran, sulitnya legalisasi akta pendirian untuk pengusaha yang berbadan hukum PT,CV,Koperasi, karena tidak jarang alamat kantor dengan notaries yang mengurus dan berwenang melakukan legalisasi berbeda tempat yang cukup jauh.

- b. Tidak jarang harus dilakukan scan ulang merek-merek yang akan diajukan pendaftarannya karena tidak memenuhi syarat pendaftaran, yang berarti banyak menambah budget dan waktu.
- c. Beberapa pengusaha yang dinominasikan dinyatakan tidak dapat diterima pendaftarannya setelah dilakukan searching di kantor merek di Jakarta, ini berakibat hilang nya biaya searching yang berakibat berkurangnya budget dan lebih sulit lagi harus dicari penggantinya apabila pengusaha yang dinominasikan tidak mau mengubah atau mengganti mereknya. Beberapa pengusaha dinyatakan gagal setelah dilakukan searching dua kali. Beberapa lokasi(Purworejo, Kudus,Kendal,Pekalongan) terpaksa mencari penggantinya yang baru karena pengusaha yang dinominasikan tidak mau merubah atau tidak mengirimkan kembali berkas persyaratannya. Hal ini berarti team harus ke lapangan kembali yang berakibat bertambahnya beban biaya serta waktu yang diprogramkan menjadi mundur.

#### **D. PROFIL PENGUSAHA YANG DIBANTU PENDAFTARAN HKI NYA**

Sebagaimana telah disinggung pada bagian terdahulu, maka target jumlah pengusaha yang akan dibantu pendaftaran HKI nya adalah sejumlah 70 (Tujuh Puluh) pengusaha dari 35 Kabupoaten/Kota terutama yang bergerak disektor unggulan atau andalan bagi daerah yang bersangkutan. Profil pengusaha yang akan dibantu terutama pengusaha UKM(usaha kecil menengah).Namun demikian , berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha yang dibantu tergolong sebagai pengusaha kecil dan hanya sebagian kecil saja yang tergolong dalam skala pengusaha menengah karena merupakan andalan bagi daerah asal perusahaan tersebut (misalnya industri karoseri untuk Kabupaten Magelang ).

Profil pengusaha yang dibantu pendaftaran HKI nya sebagaimana tersebut di bawah ini:

NO	KABUPATEN	PEMILIK	ALAMAT BDN USAHA
1.	Kota Semarang	Diah	<i>Donat,kue tart, Kue</i> Ressari Pondok Bukit Agung Blok D 28
		Herliani Jufni	<i>Jamu Instant</i> Tiga Dara Jl.Urip Somohardjo 45.Telp.6923869

2	Kabupaten Semarang	Ninuk Murniyati	Usaha Mulia/ <i>Konveksi</i> Telp.6930094.
		Slamet	<i>Kerajinan EncengGondok</i> RENITA Kebondowo RT 05 RW 10 Bukit Cinta Banyubiru
3	Salatiga	Triyanto	<i>Makanan ringan dari</i> <i>Abon Sapi</i> Nova Food Jl.Surowijoyo II no.36 HP.08164253910
		Isyati	Konveksi,Jl.tentara Pelajar 54 B Mangunsari ( <i>gagal</i> <i>pada tahap searching,</i> <i>tidak dapat diperbaharui</i> )
		Makhasin	<i>Konveksi</i> Multi Leneker Tingkir lor salatiga
4	Grobogan	Iim soesanto	<i>Kerajinan tangan dari</i> <i>kayu</i> Trijaya sakti Art Jl.Brigiend Katamso No.57 telp.0292 422418
		Bambang waluyo,BA	Tahu Sidodadi RT.04 RW II Kec Toroh kab Grobogan telp.0292 552175( <i>tidak</i> <i>mengirimkan berkar</i> <i>persyaratan</i> )
		Ir.Agus Sutopo	<i>Pupuk organic</i> Bendoharjo RT 05 RW 03 Purwodadi
5	Kendal	H.Mahfud Amin	<i>Air Minum Kemasan,</i> Sinar bahari agung Jl.pidodo raya 106 Patebon Kendal telp.0294 381383
		Hadi Purnomo,SH	Air Minum kemasan Jl.kali Bogor,Sukorejo,telp.0294 452444( <i>berkas belum</i>

			<i>dikirim:alamat pindah)</i>
		Kuntariyah,S.Kom	<b>Konveksi</b> , Karya Usaha Jl.Raya Boja Km 1 Kendal
6.	Demak	Nani eriyanti	<b>ALTO Konveksi kaos</b> Jl.jogoloyo no.25 kec Wonosalam telp.686274
		Rumaji	<b>Konveksi pakaian CV</b> Karina jayaDesa cabean RT 09 RW III( <i>gagal duakali tahap searching: diperbaharui</i> )
7.	Kabupaten Magelang	Suyanto	<b>Industri Karoseri CV</b> Anugrah Jl.Raya Secang Km.8 MGL Telp.0293 714374
		Nor rachman	<b>Makanan Ringan</b> .Desa karanglo Dusun Gulon Kec salam
8.	Magelang Kota	Hanggono	<b>Getuk Marem</b> Jl.beringin II Tidar Krajan HP.08164261863
		Purnomo	<b>Ceriping</b> Jangkar
			Jl. Beringin II No.37 Tidar Krajan Telp.0293 365645
9.	Wonosobo	Ny.Khotidjah	<b>Makanan ringan dari Jamur</b> UD Cendawan Mas,JL.bismo 97 Kauman selatan 97 RT 5 RW 23 Telp.0286 323209
		Supriyanto	<b>Makanan ringan dari ketan</b> Merpati,Krakal santen RT 04 RW 02 Karangluhur Kertek HP.08122716769



10.	Kebumen	Mahful	<i>Makanan ringan</i> Bintang wallet Desa Wonogiri RT 05 RW 01 Kec kebumen HP.08122973727
		II. Imam Sumarto	<i>Industri genteng Keramik</i> Iman Super Desa Kawayuhan RT 08 RW 02 Pejaksan telp.0287 383 888
11	Purworejo	Sabar	<i>Mebel</i> sabar,Megulung kidul Kec,Pituruh
		Yahya Hariadi	Jl.Nyai Laos 4 Purworejo( <i>gagal pada tahap searching</i> )
		Waluyo	<i>Kompor</i> Bintang Mas Desa Pogung kalangan RT 02 RW 03 Purworejo
12	Temanggung	Susilo Iswanto	Mesin perajang daun tembakau
			Jl.Kenanga 23 kebonsari
		Suwarno	<i>Mesin penetas telur</i> Demangan RT 05 RW 05 Ngadirejo Temanggung
13	Jepara	Masrukan	Kacang open tahunan RT 03 RW 02 Bendosari Jepara( <i>tidak mengirimkan berkas</i> )
		H.Abdul manan	Krupuk bakar, Desa tegalsambi RT 08 RW 05 Kec.tahunan( <i>tidak mengirimkan berkas</i> )
		Mashuri	<i>Minuman madu racik</i> , Demaan RT 1 RW 7 telp.0291 754227
		Suhud	<i>Kerajinan</i> Sungging

			adiluwih
14	Blora	Teguh Sedio Utomo	<i>Industri minuman</i> Jl.Achmad yani III/32 Telp.532165
		Mardjono Budihardjo	<i>Industri kripik tempe dan rempeyek.</i> Jl.A yani III/17 Sawahan Blora
15	Rembang	Drs.Daenuri	<i>Terasi</i> UD Kura-kura,Desa Bonang kec.Lasem telp.0295 5312552
		Sumadi	KBU Permadi, <i>kerajinan kuningan miniatur sepeda dan becak</i> ,Desa Pohlandak Kec.Pancur
16	Kudus	Hj.Hidayah	Bordir,Jl.Kh.Norhadi No.10 telp.0291 438064
			(tidak mengirimkan berkas persyaratan)
		Zaenal arifin	Jenang Karomah,Jl.Sosrokartono 263 kaliputu Telp.0291 440703
			(gagal pada tahap searching: tidak diperbaharui)
		Novariah Hizmi	Bordir, Nova Collection
17	Tegal Kota	Darnoto	<i>Shuttle Cock</i> BAZOOKA Jl.Bawal barat 53 RT 05 RW III
			Tegalsari tegal Telp 341043
		Daka bin salwa	<i>Krupuk udang</i> kembar jaya Desa Tunon tegal selatan telp.352080
18	Pemalang	Sutrisno	<i>Tenun ATBM</i> Desa

			wonorejan Utara RT 08 RW 07 Kec.Taman ( <i>gagal duakali searching: diperbaharui</i> )
		Karsidi Bin Tahar	Sukorejo RT 02 RW 01 Ulujami'
		H.Tasiman	Konfeksi Desa Rowosari Kec.Ulujami Telp.0285 577349( <i>tidak mengirimkan berkas persyaratan</i> )
19	Batang	Sri Herlina Ilaeli	UD Laksana jati Sidorejo RT 01 RW 08 Subah Batang
		Siti Khomariah	<i>Madu</i> SARI PUSPA Jl.raya Kutasari Gringsing No.79 Batang telp.0294 641060
20	Kabupaten Pekalongan	Chairunisa	<i>Batik Ratnasari</i> JL.KH.Hasyim Ashari No.93 Kemplong Wiradesa telp.0285 420898
		H.Surti Dimyati	<i>Bordir</i> ,Pekajangan 66 telp.0285 785178
21	Kota Pekalongan	Rochlan	ROCHLAN BATIK Jl.Hos Cokroaminoto Landungsari gang XIII/24 telp.0295 27904 ( <i>tidak melanjutkan</i> )
		Hj.Ichwati Sidik	<i>Batik</i> Keputran Gang 7 No 5
		H.Fachrurozi	<i>Industri Batik</i> Jl.Kh Dewantoro No.82 RT 04 RW 07 Landungsari Pekalongan
			( <i>gagal duakali tahap searching:diperbaiki</i> )
22	Berbes	Teguh Santoso	Teguh santoso Sanggul.

			Sunan Gunungjati gang III/25 Limbangan Wetan telp.0283 672380( <i>tidak mengirimkan berkas persyaratan</i> )
		Basori	Jl.Sunan Gungjati II Limabangan Wetan Rt 05 RW 02
		KH.Drajad darminto	<b>Keramik Porselin</b> Jl.Cenderawasih 107 Tanjung Telp.0283 877630
23	Kabupaten Tegal	Muhjidin	UD Masruri Putra tembok Luwung RT 17 RW 4 telp.0283 443626
		Imam Sucoko	<b>Perusahaan tahu</b> Desa Pesalakan Adiwerna RT 31 RW 02
24	Banyumas	Mingan	<b>Perusahaan Nopia</b> cap DUA GELATIK Desa kalisube RT I RW III telp.0281 796330
		Wawan	Jenang asli ketan JAKET Jl.PKK No.600 Kersi Purwokerto Timur Telp.0281 6391333( <i>tidak mengirimkan berkas persyaratan: diganti pengusaha lain</i> )
		Suripto	<b>Sale Pisang</b> Sari Mustika Desa Klahang Banyumas Purwokerto
25	Purbalingga	Ngudiyono	Pengrajin rambut FAIR LADY Desa Wisata Bojongsari Karangbanjar( <i>tidak melanjutkan program, bantuan pendaftaran merek</i> )

		Yuri Prasetyo Budi	<b>Sparepart Kendaraan bermotor</b> Cempaka Jaya Motor Jl.Ketuhu No 24 Purbalingga
		Wirmada prapanca	<b>Kerajinan tangan</b> RAMONA CRAFT Desa wisata Karang banjar Bojongsari telp.081894718
26	Banjarnegara	Kasbi Purwadi	Keramik APICTA Jl.Wargo Utomo 80 A RT 01 Klampok Telp.0286 47935. <i>(tidak mengirimkan berkas persyaratan)</i>
		Yanti SE	<b>Keramik USAHA KARYA</b> Belakang Masjid Klampok Telp.0286 479143
		Triyati Yulastuti	<b>Saos Sambal Desa</b> Purworejo Klampok Banjarnegara <i>(merek yang diajukan gagal pada tahap searching:diperbaiki)</i>
27	Cilacap	Tatun Rochmad	UD Sari Rasa sale pisang Jl.kendeng no.141 Sidonegoro Cilacap <i>(Tidak mengirimkan berkas persyaratan)</i>
		Darto Al Supin	Sale Pisang Mahkota DJ
		Awan Irawan	UD MITRA ANUGRAH NUSANTARA Kawasan Industri No.789 Telp.547416
28	Klaten	Marsudi	<b>MS teknik</b> ,Desa Tulung Kec Tulung Klaten Telp.0272 551690
		CV Bakti Garmino Utama	<b>Garment, Arie &amp; co</b>

		H.Munawir	Konveksi CV LISA, Desa Tempursari Kec Ngawen Klaten Telp.0272. 330115( <b>MEREK YANG DIAJUKAN GAGAL PADA TAHAP SEARCHING: diganti pengusaha lain</b> )
29.	Wonogiri	Suwarni Siswadi	<b>Batik Tulis SUMBER REJEKI</b> Lingkungan Bedingin Kec.Tirtomoyo,RT 01 RW 03.
		Kaminah	<b>Jamu Tradisional JOHAR MANIS</b> JL Kepodang VI/ no.16 Kampung Sukorejo, kel.Giritirto Telp.0274 323329
30.	Karanganyar	Siti Naviah	<b>Konveksi Aneka Guna,</b> Tegal Asri RT 04 RW 06 Kel. Bejen Kec. Karanganyar Telp.0271 495488
		Rochmad Dwi Santoso	<b>JAYA MANDIRI FURNITURE</b> Jl.Brantas no.1 Tegal Winangun,Tegal Gede kec Karanganyar Telp.081 2297 1024( <b>merek yang diajukan gagal pada tahap searching:Diperbaharui</b> )
31	Sukoharjo	Amin Suhadi Sutiman	<b>Aneka Karya Glass,</b> Pakelan RT 01 RW 02 No.36 Pabelan Kartosuro, Sukoharjo Telp.0271 726070

		Haryanto	<b>Tatah Sungging</b> , Sanggar Wayang, Tengklek Rt 02 RW XI Telukan Grogol Sukoharjo Telp.0271 651581( <i>gagal pada tahap searching: diperbaharui</i> )
32	Boyolali	Abdul Rochmad	<b>Industri Makanan Abon</b> , Ploso Kerep RT 01 RW 03 Winong Telp.0276 322184
		Ny. Hadi Suratno	<b>Makanan Ringan Marning</b> , Jl.Pandanaran No.211 a Telp.0276.321 803
33	Surakarta	Saleh Achmad	<b>Jamu Tradisional</b> , Majasari, Sayangan Kulon RT 01 RW 03 Jl. Tiga Negeri III A
		Eko Priyono	<b>Sapu Rayung</b> , LINA Krembyong RT 05 Kadipiro- Banjar sari
34	Sragen	H Supardjan	<b>Batik Brotoseno</b> , Kuyang RT 04 RW 01 Kliwonan Masaran Sragen
		Sundari	Widja Makmur
		Ny.Kaheni	Lia Konveksi Jl Kawi 4 Belakang SMEAN Sragen( <i>merek yang diajukan gagal pada saat searching:diganti pengusaha lain</i> )
35	Pati	Sareh	<b>Kerajinan kuningan</b> Siro Rysky, Tluwah RT 03 RW 01 Juwana
		Marsudi Supardjo	LS, Growong lor RT 07 RW 03 Juwana Pati( <i>catatan @ merek yang diajukan gagal pada tahap searching: diganti pengusaha lain</i> )

		Bambang Poernomo	<i>Kerajinan kuningan</i> ISAMA Silugonggo Juana Pati



## **E PROFIL PENGUSAHA DILIHAT DARI ASPEK KRITERIA UNGGULAN**

Berikut akan disajikan hasil penelitian dalam bentuk tabel- tabel berkaitan dengan responden. Tabel – tabel berikut akan memberikan informasi terkait dengan beberapa hal seperti; bentuk badan usaha, bidang usaha, jenis usulan perlindungan hukum atas HKI yang dikhendaki oleh para pengusaha/UKM pengusul.

Hal lain yang akan disajikan dalam tabel –tabel adalah menyangkut beberapa kriteria unggulan yang mendasari dipilihnya UKM tertentu untuk dibantu dalam pendaftaran perlindungan hukum atas HKI dengan biaya yang ditanggung proyek atas beban biaya APBD I Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.tahun 2001. Kriteria unggulan tersebut antara lain: aspek bahan baku, aspek SDM, aspek pasar bagi produk responden dan aspek merek, yang terakhir disebut bukan merupakan kriteria unggulan.

Tabel 1  
Badan Usaha  
N : 70

JENIS BADAN USAHA	FREKUENSI	PROSENTASE
PT	2	2,9
CV	7	10
UD	23	32,9
PERORANGAN	38	54,3
TOTAL	70	100

Sumber : Data Primer yang diolah 2001

Dari tabel di atas dapat diketahui dari 70 responden pengusaha kecil menengah yang menjadi sasaran dalam proyek perlindungan hukum atas HKI di Jawa tengah yang berbentuk Perseroan terbatas ada 2 buah (2,9%) yang berbentuk CV jumlahnya ada 7 buah (10%) . Yang terbesar adalah berbentuk perorangan jumlahnya mencapai 38 buah (54,3%) adapun yang berbentuk usaha dagang (UD) besarnya 13 buah (18,6%). Dari 70 responden yang tidak mencantumkan bentuk badan usahanya /tidak menjawab sebesar 10 pengusaha (14,3%).

Tabel 2  
Bidang Usaha  
N : 70

JENIS USAHA	FREKUENSI	PROSENTASE
MAKANAN	28	40
BENGKEL	3	4,3
KERAJINAN	15	21,4
KONVEKSI/GARMEN	14	20
MEBEL/FURNITURE	6	8,6
MINUMAN	3	4,3
TIDAK MENJAWAB	1	1,4
TOTAL	70	100

Sumber : Data Primer yang diolah, 2001

Dari Tabel di atas dapat diketahui berdasarkan jenis usaha ternyata usaha kecil menengah yang berminat mengajukan perlindungan hukum atas HKI yang paling besar jumlahnya adalah jenis usaha bidang makanan ada 28 buah (40%), sedangkan urutan kedua adalah jenis usaha kerajinan jumlahnya ada

15 buah (21,4%). Konveksi atau garmen menempati urutan ketiga dengan jumlah 14 buah (20 %), sisanya jenis usaha mebel/furniture, minuman dan tidak menjawab masing – masing jumlahnya 6buah (8,6%) untuk mebel/furniture, 3 buah (3%) untuk minuman dan sebuah (1,4 %) tidak menjawab.

Tabel 3  
Usulan Perlindungan Hukum atas HKI  
N : 70

MERREK	69	98,6
PATEN SEDERHANA	1	1,4
TOTAL	70	100

Sumber : Data Primer yang diolah, 2001

Dari hasil penelitian lapangan dapat diketahui bentuk perlindungan hukum atas HKI yang dikehendaki oleh para pemohon . Dari 70 permohonan yang berasal dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 66 buah (94,3%) adalah permohonan untuk memperoleh perlindungan dalam bentuk merk, permohonan perlindungan hukum dalam bentuk paten hanya 3 buah permohonan (4,3%), sedangkan yang paling sedikit adalah permohonan perlindungan dalam bentuk hak cipta.. Dilihat dari prosedurnya permohonan paten ini yang paling rumit di samping biayanya paling tinggi jika dibanding dengan biaya permohonan merek dan hak cipta, yang paling murah adalah permohonan hak cipta.

Usaha kecil menengah yang mendapat bantuan pendaftaran perlindungan hukum atas HKI secara cuma cuma dipilih dari berbagai produk yang

dimiliki oleh setiap kabupaten/kota yang merupakan produk unggulan bagi masing masing kabupaten/kota tersebut.

Berikut ini akan disajikan tabel –tabel yang terkait dengan kriteria unggulan dilihat dari berbagai aspek

#### A. Aspek Bahan Baku

Dalam kelompok bahan baku hal – hal yang akan disajikan adalah data tentang darimana asal bahan baku, cara memperoleh bahan baku, kriteria bahan baku yang dapat digunakan dan yang tidak dapat digunakan jika bahan itu tidak hanya semacam bahan baku yang dominan, peranan pihak lain dalam menentukan bahan baku. Berikut ini adalah tabel –tabel yang terkait dengan aspek bahan baku.

Tabel 4  
Asal Bahan Baku  
N : 70

ASAL BAHAN BAKU	FREKUENSI	PROSENTASE
DALAM DAERAH	27	38,6
LUAR DAERAH	19	27,1
DALAM & LUAR DAERAH	24	34,3
TOTAL	70	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2001

Kriteria unggulan yang pertama adalah masalah ketersediaan bahan baku.,Kemudahan memperoleh bahan baku menjadi pertimbangan

utama masuk tidaknya suatu produk ke dalam kriteria unggulan. Hal ini terkait erat dengan keberlangsungan proses produksi yang juga berarti keberlangsungan kehidupan buruh dan keluarganya dan yang tidak kalah penting kontribusi pada pemerintah daerah yang tidak kecil juga akan berlangsung terus.

Dari tabel di atas dapat diketahui perusahaan yang mengandalkan bahan baku lokal/daerah sendiri untuk memenuhi kebutuhan produksi ada 27 jenis usaha (38,6%), dari 70 jenis usaha yang mengandalkan bahan baku dari luar daerah jumlahnya ada 19 jenis usaha (27,1%). Perusahaan yang mengantungkan proses produksinya pada pasokan bahan baku baik dari dalam daerah sendiri maupun dari luar jumlahnya ada 24 jenis usaha (34,3%).

Tabel 5  
Cara memperoleh Bahan Baku

N : 70

PENGADAAN BAHAN BAKU	FREKUENSI	PROSENTASE
USAHA SENDIRI	14	20
USAHA PIHAK LAIN	40	57,1
USAHA SENDIRI & PIHAK LAIN	16	22,9
TOTAL	70	100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2001

Dari tabel di atas dapat diketahui dalam hal cara pengadaan bahan baku perusahaan yang mengandalkan pengadaan bahan baku dari usaha sendiri ada 14 perusahaan (20%). Pengertian usaha sendiri ini lebih menekankan pihak perusahaan bersifat aktif untuk mencari

bahan baku misalnya dengan cara membeli langsung pada produsen bahan baku misalnya jamur merang sebagai bahan baku pembuatan kripik jamur di mana perusahaan kripik jamur langsung berhubungan dengan PT Dieng Indah sebagai pemasok bahan baku. Perusahaan yang mengandalkan bahan baku dari jasa pihak lain seperti layaknya perantara dari hasil penelitian ini diketahui jumlahnya ada 40 perusahaan (57,1%) angka ini menunjukkan dalam proses produksinya perusahaan yang mengajukan permohonan perlindungan hukum atas HKI sebagian besar tidak dapat memenuhi kebutuhan bahan baku dengan cara pengadaan sendiri, jadi selalu melibatkan produsen bahan baku.

Hal ini sangat positif apalagi jika pemasok bahan baku juga berasal dari daerah yang sama karena disamping bias mengurangi biaya pengadaan bahan baku juga akan menciptakan jalinan usaha yang saling mendukung yang pada gilirannya akan memperkuat kondisi keuangan daerah. Mengingat bahan baku untuk proses produksi belum dapat dipenuhi sendiri maka di samping mengusahakan sendiri juga melibatkan pihak lain dalam upaya pemenuhan bahan baku untuk proses produksinya sebagai contoh usaha pembuatan makanan kecil (rengginan) dengan bahan dasar beras ketan yang berada di Kabupaten Wonosobo yang pemasarannya sudah memasuki Jawa Timur untuk pengadaan bahan bakunya disamping diambil dari sawah sendiri juga membeli dari para pedagang beras ketan. Jumlah perusahaan yang dalam pengadaan bahan bakunya di samping mengusahakan sendiri juga melibatkan pihak lain (penyedia bahan baku) jumlahnya ada 16 perusahaan (22,9%)

Tabel 6  
Pengaruh Bahan Baku terhadap Proses Produksi

N: 70

PENGARUH BAHAN BAKU	FREKUENSI	PROSENTASE
TETAP BERPRODUKSI	53	75,7
TIDAK DAPAT BERPORDUKSI	13	18,6
TIDAK MENJAWAB	4	5,7
TOTAL	70	100

Sumber : Data Primer yang diolah, 2001

Dari tabel di atas dapat diketahui dari 70 responden pengusaha kecil menengah yang menjadi sasaran dalam proyek perlindungan hukum atas HKI di Jawa tengah yang menjawab tetap berjalan proses produksinya walaupun terjadi kelangkaan bahan baku jumlahnya ada 53 (75, 7%) , tentunya kelangkaan bahan baku tetap akan memberikan pengaruh kuat terhadap keberlangsungan proses produksi sehingga dapat dipastikan kelangkaan bahan baku setidaknya –tidaknya akan mengurangi jumlah produksi. Sedangkan perusahaan yang menjawab kelangkaan bahan baku akan berakibat terhentinya proses produksi jumlahnya ada 13 perusahaan (18,6 %). Hal ini sangat wajar apalagi bagi perusahaan yang sangat menggantungkan pengadaan bahan baku dari pasokan pihak lain. Terkait dengan kegiatan proses produksi tetap berlangsung atau tidak jika terjadi kelangkaan bahan baku ternyata ada 4 perusahaan (5,7%) yang tidak memberikan jawabannya.

Tabel 7  
Penggunaan Bahan Baku  
N : 70

CARA PENGGUNAAN	FREKUENSI	PROSENTASE
LANGSUNG	42	40 %
DIOLAH LEBIH DULU	28	60 %

Sumber : Data Primer yang diolah, 2001

Tabel di atas menunjukkan dari 70 perusahaan yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat diketahui 42 perusahaan (60%) langsung memanfaatkan bahan baku dalam proses produksinya. Pengertian langsung di sini adalah bahwa bahan itu langsung digunakan misalnya dalam perusahaan makanan bahan –bahannya tidak memerlukan proses pendahuluan lebih dahulu tetapi langsung diproses menurut resepnya, demikian juga untuk perusahaan garmen/konveksi. Adapun yang memerlukan proses pendahuluan sebelum produk dibuat misalnya perusahaan pembuatan keramik di mana perlu pengolahan pendahuluan terhadap tanah liat yang menjadi bahan dasar. Demikian juga dalam produksi kerajinan tatah sungging dengan bahan dasarnya kulit binatang seperti kulit kambing, sapi atau kerbau. Bahan baku ini sebelum digunakan harus dimasak kemudian dibersihkan bulunya dengan air panas atau kapur setelah kering baru ditatah/sungging.



Tabel 8  
Besarnya Dana Awal  
N : 70

BESAR DANA	FREKUENSI	PROSENTASE
- 20 %	11	15,7 %
21 – 40	15	21,4%
41 – 60	44	62,9 %
TOTAL	70	100 %

Sumber : Data Primer yang diolah, 2001

Besarnya dana awal yang digunakan oleh 70 perusahaan yang menjadi responden dalam penelitian ini mempunyai variasi antara 20% hingga 60 %. Dari tabel di atas dapat diketahui perusahaan yang menggunakan dana awal sebesar 20 % dibanding dana/biaya produksi saat ini jumlahnya ada 11 perusahaan (15,7 %) , adapun yang menggunakan dana awal hingga 40 % jumlahnya ada 15 perusahaan (21,4%). Dari keseluruhan responden yang jumlahnya ada 70 perusahaan ternyata yang paling besar menggunakan dana awal sebesar 41 % - 60 % yaitu jumlahnya ada 44 perusahaan (62,95%).

Apabila kita cermati dari data mengenai dana awal yang digunakan maka dapat dikatakan 26 perusahaan (37,1 %) boleh dibilang berhasil mengembangkan perusahaanya hal ini terlihat dari prosentase dana awal dibandingkan dengan dana operasional saat ini, semakin besar proporsi dana awal dibanding dengan dana saat ini dapat dijadikan salah satu indikasi keberhasilan dalam mengembangkan usahanya.

## B. Aspek Sumberdaya Manusia

Kriteria unggulan yang kedua terkait dengan aspek SDM. Sumberdaya manusia dalam suatu perusahaan merupakan motor penggerak roda perusahaan, semakin baik sumberdaya manusia yang menjalankan perusahaan dapat diharapkan kemajuan yang akan dicapai oleh perusahaan itu akan semakin besar. Sebaliknya jika sumberdaya manusia yang menjalankan roda perusahaan mempunyai kategori rendah maka perkembangan perusahaan itu akan tersendat – sendat.

Berikut ini akan disajikan data dalam bentuk tabel terkait dengan masalah sumberdaya ,manusia yang menjalankan roda perusahaan

Tabel 9  
Jumlah Karyawan/pekerja  
N : 70

JUMLAH	FREKUENSI	PROSENTASE
S/D 5 orang	6	8,6%
6 – 10 orang	8	11,4%
11 – 15 orang	21	30%
16 – 20 orang	11	15,7%
21 orang dan selebihnya	24	34,3%
TOTAL	70	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2001

Dilihat dari jumlah karyawan atau pekerjayang bekerja pada suatu perusahaan dari tabel di atas dapat dilihat variasinya yaitu berkisar antara sampai dengan 5 hingga 21 tenaga kerja atau lebih. Dari tabel di atas dapat diketahui dari 70 perusahaan ternyata sebagian besar mempunyai karyawan antara 11 hingga 21 pekerja atau lebih. 24 perusahaan (34,3%) menempati posisi; perusahaan

dengan jumlah karyawan/pekerja terbanyak. Perusahaan yang mempunyai jumlah karyawan 16 hingga 20 orang jumlahnya ada 11 perusahaan (15,7%). Perusahaan yang mempunyai karyawan berkisar antara 11 orang hingga 15 orang jumlahnya ada 21 perusahaan (30%), sedangkan yang jumlah karyawannya 6 orang hingga 10 orang jumlahnya ada 8 perusahaan (11,4%), yang terkecil jumlah karyawannya yaitu antara 1 orang hingga 5 orang jumlahnya ada 6 perusahaan (8,6%).

Dilihat dari jumlah karyawan yang terlibat dalam suatu perusahaan dapat diketahui perusahaan –perusahaan yang mendapat bantuan biaya pendaftaran merek atau hak patennya adalah betul – betul perusahaan yang skalanya kecil menengah, sehingga bias dikatakan pelaksanaan proyek ini tepat pada sasaran seperti yang diharapkan sebelumnya.

Tabel 10  
Komposisi Tenaga Kerja  
N : 70

KOMPOSISI	FREKUENSI	PROSENTASE
SELURUHNYA TENAGA LOKAL	55	78,6%
SEBAGIAN DARI LUAR DAERAH	15	21,4%
TOTAL	70	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2001.

Dari tabel di atas dapat diketahui dari 70 perusahaan yang diteliti ternyata hampir seluruhnya yaitu 55 perusahaan (78,6%) menggunakan tenaga local di mana perusahaan itu berada/beroperasi. Tentunya hal ini sangat positif apalagi dikaitkan dengan semangat otonomi daerah di mana potensi daerah terus digali dan ditingkatkan. Pemanfaatan tenagakerja dari daerah sendiri akan mempunyai keuntungan ganda di samping mengurangi angka

pengangguran juga mengurangi dampak –dampak negatif yang timbul sebagai akibat ikutan dari adanya pengangguran.pemanfaatan tenaga kerja daerah sendiri akan menimbulkan rasa cinta daerah sendiri dan menambah semangat kerja. Sedangkan perusahaan yang masih memanfaatkan tenaga kerja dari luar daerah sebagai pelengkap jumlahnya ada 15 perusahaan (21,4%) saja. Hal ini disebabkan oleh tenaga kerja dari luar daerah tersebut mempunyai kemampuan yang dibutuhkan perusahaan dan kebetulan belum terisi oleh “putra daerah” sendiri. Sepanjang itu bersifat sementara selagi tenaga kerja lokal belum memadai biās dibenarkan, akan tetapi jika banyak tenaga lokal mempunyai kapasitas seperti yang dibutuhkan perusahaan maka dengan semangat otonomi daerah perlu lebih memperhatikan tenaga kerja lokal.

Tabel 11  
Tingkat Pendidikan Tenagakerja

N : 70

PENDIDIKAN	FREKUENSI	PROSENTASE
SD	10	14,3%
SLTP	32	45,7%
SLTA	14	20%
SARJANA	14	20%
TOTAL	70	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2001

Dari tabel di atas dapat diketahui tenaga kerja yang bekerja pada UKM yang menjadi sasaran kegiatan yang terbesar adalah berpendidikan SLTP atau yang sederajat, adapun besarnya ada 32 UKM (45,7%).Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja dengan pendidikan SD atau yang sederajat jumlahnya ada 10 UKM (14,3%), sedangkan yang tenaga kerjanya rata –rata

pendidikannya SLTA dan yang sederajat jumlahnya ada 14 perusahaan (20%). Dari 70 perusahaan yang mempunyai tenaga kerja sarjana ada 14 perusahaan (20%). Tenaga kerja sarjana ini biasanya pemilik atau keluarga pemilik perusahaan, sebagai contohnya perusahaan garmen/bordir di Kabupaten Kendal yang sekarang dipegang anaknya yang pendidikannya sarjana komputer, alumnus PTS Komputer di Kota Semarang.

Dominannya tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD hingga SLTA disebabkan pekerjaan yang ada pada UKM yang menjadi responden penelitian secara umum tidak mensyaratkan adanya keahlian khusus/pendidikan dengan tingkat tertentu. Meskipun demikian bukan berarti tidak dibutuhkan keahlian tertentu hal ini dapat diketahui dari tabel berikut yang menunjukkan bidang keahlian yang diperlukan meskipun tidak harus sarjana.

Tabel 12  
Bidang keahlian yang diperlukan

N : 70

KEAHLIAN	FREKUENSI	PROSENTASE
TIDAK PERLU	41	58,6%
PERLU :		
➤ PERAKITAN	4	5,7%
➤ DESIGN	12	17,1%
➤ LAS DAN CAT	3	4,3%
➤ QUALITY	3	4,3%
CONTROL	1	1,4%
➤ APOTEKER	2	2,9%
➤ PENGAWETAN	2	2,9%
➤ PEMBUKUAN	2	2,9%
➤ PERKAYUAN		
TOTAL	70	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2001

Dari tabel di atas dapat diketahui dari 70 perusahaan yang menjadi responden ternyata hanya 29 perusahaan (41,4%) yang membutuhkan keahlian

sedangkan sisanya 41 perusahaan (58,6%) tidak membutuhkan keahlian tertentu dalam menjalankan roda perusahaan.

Keahlian yang diperlukan oleh 29 perusahaan adalah sbb:

Dari 70 UKM yang menjadi responden atau dari 29 UKM yang menyatakan dibutuhkan keahlian dalam bekerja di perusahaannya dapat dirinci sebagai berikut :yang membutuhkan ahli bidang perakitan jumlahnya ada 4 UKM, (5,7%), 12 UKM (17,1%) membutuhkan ahli untuk bidang design, sementara itu yang membutuhkan las dan cat 3 (4,3%), quality control 3 (4,3%), apoteker 3 (4,3%), pengawetan 1 (1,4%), pembukuan 2 (2,9%) dan perkayuan 2 (2,9%). Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa keahlian pekerja merupakan hal yang penting meskipun dalam kenyataannya baru beberapa orang saja yang mempunyai keahlian. Adanya keahlian kendali kualitas menunjukkan responden yang terdiri dari UKM telah mulai memperhatikan kualitas produk , tentunya hal ini sangat bermanfaat dalam persaingan yang lebih luas harga yang murah saja tidak cukup tetapi harus didukung kualitas yang bagus.

Tabel 13  
Pendidikan Tambahan/Training  
N : 70

TRAINING	FREKUENSI	PROSENTASE
ADA	21	30%
TIDAK ADA	49	70%
TOTAL	70	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2001

Dari tabel di atas dapat diketahui dari 70 UKM yang menjadi responden penelitian dapat diketahui 21 UKM (30%) melaksanakan/mengikutsertakan

pekerjanya untuk meningkatkan ketrampilan/pengetahuan lewat training atau penyuluhan atau kursus singkat. Baik didalam atau di luar perusahaan. Usaha ini sangat penting dan harus terus dikembangkan mengingat dalam pasar global kemampuan SDM perusahaan akan sangat menentukan diakui tidaknya perusahaan tersebut dapat dilihat dari ada tidaknya apresiasi masyarakat/konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.

### C. Aspek Pemasaran Produk Unggulan Daerah

Kriteria berikutnya adalah pemasaran produk unggulan daerah. Pemasaran mempunyai kunci yang penting untuk menentukan hidup matinya atau maju tidaknya suatu usaha. Produk yang bagus akan tidak mempunyai arti jika tidak bisa dipasarkan. Kerugian yang muncul karena tidak dapatnya suatu produk dipasarkan akan memberi dampak kerugian yang bersifat ikutan yang akan saling menyeret sehingga kerugian yang diderita secara komulatif akan sangat merugikan, tidak hanya pada pengusaha, pekerja, penyedia bahan baku tetapi juga pemerintah daerah.

Strategi Pemasaran yang jitu dapat menghilangkan kemungkinan tidak dapat dipasarkannya produk yang sebenarnya mempunyai kualitas baik. Menciptakan pasar lokal yang ajeg merupakan landasan untuk mengembangkan sayap ke luar daerah. Pasar lokal yang mantap dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dibanding pasar di luar daerah.

Berikut akan disajikan data dalam bentuk tabel terkait dengan pemasaran produk unggulan daerah, kendala-kendala yang muncul dll.

Tabel 14  
Pemasaran Produk Unggulan Daerah  
N : 70

CARA PEMASARAN	FREKUENSI	PROSENTASE
LANGSUNG KE KONSUMEN	34	45,6%
AGEN/DISTRIBUTOR	20	28,6%
TENGKULAK	16	24,8%
TOTAL	70	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2001

Dari tabel di atas dapat diketahui dari 70 UKM yang menjadi responden ternyata cara pemasaran langsung pada konsumen merupakan pilihan pertama adapun jumlahnya ada 34 UKM (45,6%). Pilihan ini didasari pemikiran yang sederhana yaitu “barang diserahkan uang diterima” dan ini bisa dipahami mengingat pasar produk sebagian besar adalah pasar lokal. UKM yang bekerjasama dengan agen atau distributor untuk memasarkan produknya jumlahnya ada 20 UKM (28,6%).

Hal yang tidak diharapkan tetapi masih juga terjadi adalah masuknya tengkulak dalam rantai pemasaran produk unggulan daerah. Masuknya tengkulak erat kaitannya dengan permodalan, oleh karena itu perlu diupayakan adanya modal dengan bunga rendah yang siap mendukung roda produksi untuk jangka panjang, jika hal ini terlaksana maka keberadaan tengkulak tidak akan berlangsung lama. Dari tabel di atas dapat diketahui 16 UKM (24,8%) bergantung pada tengkulak untuk memasarkan produknya.



Tabel 15  
Kendala Pemasaran  
N: 70

KENDALA	FREKUENSI	PROSENTASE
ADA	30	42,8%
TIDAK ADA	40	57,2%
TOTAL	70	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2001

Kendala dalam pemasaran selalu ada hanya bobotnya antara UKM satu dengan UKM lain berbeda -beda .Dari tabel di atas dapat diketahui UKM yang merasa tidak menjumpai kendala atau menganggap kendala itu tidak berarti jumlahnya ada 40 UKM (57,2%), adapun yang menjumpai atau merasa menghadapi kendala yang cukup berarti jumlahnya lebih kecil yaitu 30 UKM (42,8%).

Meskipun jumlah yang tidak menghadapi kendala pemasaran lebih besar bukan berarti kita bisa berpangku tangan. Kita harus mampu mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh para UKM. Cara yang terbaik untuk mencari solusi adalah dengan mengidentifikasi faktor – faktor yang menjadi penyebab munculnya kendala tersebut, baru dipikirkan cara pemecahannya secara “comprehensive”, sehingga tidak menyisakan atau memunculkan masalah baru.

Indentifikasi faktor penyebab dapat dikelompokkan kedalam faktor ekstern (seperti: persaingan dengan pengusaha lain, masalah transportasi selera konsumen, dll) dan intern (seperti mutu yang rendah, kemasan yang buruk, kelebihan produksi dll)

## F. DATA KASUS HKI DI BEBERAPA KABUPATEN/KOTA

Data kasus yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (HKI) yang terdapat di beberapa Kabupaten/Kota diidentifikasi dengan mengirimkan permohonan data kasus ke Kepala kantor Dinas Perindustrian perdagangan dan Koperasi di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sebanyak 35 Kabupaten/Kota. Dari 35 Kabupaten/Kota hanya beberapa Kantor Perindagkop yang melaporkan adanya kasus HKI yang pernah dilaporkan oleh UKM ke Kantor tersebut, hal ini berarti tidak semua Kantor Dinas Perindustrian perdagangan dan Koperasi di daerah pernah mendapat laporan tentang adanya kasus HKI dari pengusaha yang ada di wilayahnya. Berdasarkan informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan ke lokasi yang bersangkutan untuk mengadakan konfirmasi serta memberikan advis hukum HKI sejauh dibutuhkan oleh para pihak. Atas dasar keterbatasan (waktu, biaya, personil yang ada) maka Klinik HKI membatasi diri untuk *tidak memberikan jasanya pada persoalan HKI yang tengah berlangsung melalui Pengadilan*, dengan demikian hanya terbatas pemberian solusi berupa advis secara Cuma-Cuma ataupun memberikan jasanya berupa registrasi apabila hal itu merupakan salah satu pemecahan yang dibutuhkan.

Beberapa kasus HKI yang berhasil dihimpun di lapangan sebagai berikut:

NO	KARISIDENAN/KABUPATEN	JENIS KASUS	KETERANGAN
1	EKS KARISIDENAN KEDU		
	KABUPATEN MAGELANG	MEREK	
	KOTA MAGELANG	NIHIL	

	PURWOREJO	NIHIL	
	KEBUMEN	HAK CIPTA	
	WONOSOBO	MEREK	
2.	EKS KARISIDENAN BANYUMAS		
	PURWOKERTO	NIHIL	
	CILACAP	MEREK	
	PRUBALINGGA	NIHIL	
	BANJAR NEGARA	NIHIL	
3.	EKS KARISIDENAN SEMARANG		
	KOTA SEMARANG		
	KABUPATEN SEMARANG	NIHIL	
	SALATIGA		
	GROBOGAN/PURWODADI	NIHIL	
	DEMAK		
	KENDAL	NIHIL	
4.	EKS KARS PEKALONGAN		
	KOTA PEKALONGAN	NIHIL	
	KABUPATEN PEKALONGAN	NIHIL	
	PEMALANG	MEREK	
	BATANG	NIHIL	
	KOTA TEGAL	NIHIL	
	KABUPATEN TEGAL	MEREK SEPATU ASELI VS ASTRI	Diselesaikan lewat pengadilan
5.	EKS KARISIDENAN PATI		
	PATI	MEREK	
	JEPARA	NIHIL	
	REMBANG	NIHIL	
	BLORA	NIHIL	
	KUDUS	MEREK	
6.	EKS KARISIDENAN		

	SURAKARTA		
	SURAKARTA	NIHIL	
	BOYOLALI	NIHIL	
	KLATEN	NIHIL	
	WONOGIRI	NIHIL	
	KARANGANYAR	NIHIL	
	SUKOHARJO	NIHIL	
	SRAGEN	NIHIL	

Sumber data primer yang diolah 2001

## 1.KABUPATEN MAGELANG

*Wawancara dengan ISKANDAR,Kepala Subdin Bina Industri, Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Kabupaten Magelang,Rabu 28 September 2001*

### a.Posisi Kasus

Purwogondo, sebuah desa yang berada di Kecamatan Grabag kurang lebih 10 Km dari kabuupaten Magelang merupakan sentra pengrajin makanan ringan “slondok”.Makanan ringan yang bahan baku utamanya dari ketela pohon. Sentra ini menggunakan nama bersama,yaitu NGUDI RAHARDJO, sebuah nama bersama kelompok pengrajin slondok yang beranggotakan kurang lebih 143 anggota di bawah pimpinan Totok Indriyanto. Hasil pengrajin slondok ini telah banyak dipasarkan di berbagai kota di Jawa , termasuk di Ibu Kota Jakarta.Masing-masing anggota menggunakan merek sendiri dalam memasarkan produknya pada konsumen.Di Pasaran ternyata banyak produsen di luar kelompok Ngudi Rahardjo yang memasarkan produk slondoknya dengan menggunakan label Ngudi Rahardjo dalam kemasan produknya, dan pernah terjadi kasus pengaduan ke

polisi adanya konsumen yang merasa pusing setelah mengkonsumsi makanan tersebut di daerah Bekasi. Setelah dilakukan cek ulang di lapangan ternyata tidak ada anggota kelompok ngudi Rahardjo di Sentra ini yang memproduksi makanan ringan tersebut.

#### **b. Advis Hukum**

Klinik Haki menyarankan agar kelompok Ngudi Rahardjo, yang beranggotakan kurang lebih 143 pengrajin slondok tersebut mendaftarkan nama NGUDI RAHARDJO beserta logo atau simbolnya sebagai MEREK KOLEKTIF, yaitu sebuah merek yang dimiliki bersama oleh semua anggota kelompok dan hanya dapat dipakai oleh anggota kelompok, diluar anggota kelompok tidak berhak menggunakan merek kolektif tersebut. Permohonan pendaftaran merek kolektif hanya akan diterima bila permohonan *dengan jelas dinyatakan bahwa merek tsb akan digunakan sebagai merek kolektif.*

Pendaftaran merek kolektif Wajib disertai dengan ***KETENTUAN PENGGUNAAN MEREK TSB SEBAGAI MEREK KOLEKTIF YANG DITANDATANGANI OLEH SEMUA PEMILIK MEREK YBS.***

Ketentuan diatas memuat :

- a. SIFAT, CIRI UMUM, ATAU MUTU BARANG ATAU JASA YANG AKAN DIPRODUKSI ATAU DIPERDAGANGKAN;
- b. Pengaturan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tsb.

c. Sanksi pelanggaran peraturan penggunaan merek kolektif.

Seandainya permohonan pendaftaran diterima oleh kantor merek maka logo, symbol merek Ngudi rahardjo akan dapat digunakan oleh semua anggota kelompok dalam produknya, dengan demikian anggota kelompok dapat memasarkan produknya pada konsumen dengan merek Ngudi rahardjo A, Ngudi rahardjo B dsb. Lebih penting lagi Ngudi rahardjo mempunyai hak untuk melarang siapapun diluar anggota kelompok yang menggunakan merek Ngudi Rahardjo baik pidana maupun perdata.

## 2. KABUPATEN KEBUMEN

*Wawancara dengan Kepala kantor Dinas Perindagkop Kabupaten Kebumen, Rabu 28 September 2001.*

### a. Posisi Kasus

Drs. Sufiyadi, seorang pengusaha genting Sokka Kebumen yang mempunyai Hak Cipta atas bentuk dan ukuran tertentu dari sebuah genting Sokka yang merupakan ciri khas dan produk andalan Kabupaten Kebumen. Berdasarkan informasi yang disampaikan pada kami ciptaanya tersebut telah didaftarkan di kantor HKI di Jakarta. Di pasaran ternyata bentuk genting tersebut banyak ditiru oleh pengrajin lain, karena produk ini sangat laku di pasaran. Pemilik hak cipta mengadukan ke Perindagkop karena tidak mampu mengatasi persoalan peniruan yang dilakukan oleh banyak pengrajin.

### b. Advis Hukum

Hak cipta hanya melindungi bentuk fisik atau bentuk nyata dari sebuah ide atau gagasan atau konsep. Bentuk fisik tersebut dibatasi hanya dalam beberapa kategori sebagai mana tercantum dalam UUHC. Tetapi yang terpenting adalah termasuk dalam lingkup Ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Bentuk yang khas dari sebuah genting sokka mungkin salah satu dari bentuk seni yang mungkin akan dilindungi dengan hak cipta. Namun sejauh itu merupakan hal yang umum dimata pengrajin genting Sokka yang tidak dapat diketahui lagi siapa penciptanya maka itu dianggap untuk sementara waktu pemegang hak ciptanya adalah pemerintah. Dengan demikian siapapun boleh menirunya tanpa dianggap melanggar hak cipta. Se jauh itu berkaitan dengan bentuk yang khas dari sebuah genting Sokka yang berbeda dengan yang lain maka hal itu merupakan karya yang original yang patut dan memenuhi syarat mendapat perlindungan hak cipta, dengan demikian mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa ijinnya menggunakan ciptaan tersebut, terlebih lagi sebuah hak cipta dapat diperoleh tanpa harus didaftarkan. Namun demikian diakui bahwa penegakan pelanggaran hak cipta itu memang sangat sulit diselesaikan karena dengan membuat modifikasi karya cipta yang sudah ada atau berbeda sedikit dengan karya yang dilindungi hak cipta juga sah mendapat hak cipta. Jalan keluar yang mungkin dapat dilakukan adalah melakukan system lisensi, artinya pihak yang sudah terlanjur memasarkan produknya dengan meniru ciptaan orang lain diminta kesediannya untuk mengakui bahwa itu bukan ciptaanya dan ciptaanyan adalah meniru milik orang lain dan sebagai kompensasinya harus bersedia membayar sejumlah

uang sesuai dengan kesepakatan mereka, daripada persoalan ini diselesaikan secara pidana atau perdata.

### 3. KABUPATEN CILACAP

*Wawancara dengan YUWONO, Kasubdin Industri Kantor Dinas Perindagkop dan pertambangan Kabupaten Cilacap, Kamis 29 September 2001.*

#### a. Posisi kasus

DJ, adalah merek yang dipergunakan untuk produk sale pisang yang cukup terkenal untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya. Merek ini telah digunakan di pasaran untuk produk sale pisang hampir lima tahun lamanya. Kusairi, pemilik merek tersebut belum pernah mendaftarkan merek ini di kantor merek. Faktor biaya, faktor ketidakuahannya untuk mengurus persyaratan dan dimana harus mendaftar adalah beberapa persoalan yang dihadapinya. Akhir-akhir ini banyak sale pisang yang menggunakan merek DJ yang bukan buatannya yang berakibat turunnya omset sampai dengan 40 % dari biasanya. Atas peristiwa ini Kusairi pernah melaporkan ke Perindag Cilacap dan bermaksud melaporkan hal ini ke aparat Kepolisian dan berencana melakukan gugatan ke Pengadilan.

#### b. Advis Hukum

Atas dasar kasus yang terjadi maka telah disarankan untuk segera mendaftarkan merek DJ untuk produk sale pisang agar segera diketahui apakah merek tersebut dapat diterima oleh kantor merek atau tidak. Apabila pendaftaran merek diterima maka akan memberikan hak bagi pemilik merek untuk menegakkan haknya melarang orang lain yang tanpa



ijinnya menggunakan merek yang sama dengan merek miliknya tanpa ijin. Dengan demikian ada dasar yang kuat untuk melakukan pengaduan pada aparat kepolisian agar mengambil tindakan penyidikan adanya dugaan pelanggaran merek, mengingat UU merek yang saat ini berlaku menentukan pelanggaran merek adalah delik aduan. Selain itu juga akan merupakan bukti yang sangat kuat apabila ingin dilakukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan. Tanpa dilakukan pendaftaran merek maka merek DJ tidak akan dilindungi hukum merek, yang berarti tidak mempunyai kekuatan untuk melarang orang lain menggunakan merek tersebut. Seandainya pendaftaran ditolak oleh kantor merek, maka berkas penolakannya pun dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa pemohon pernah melakukan pendaftaran merek tersebut, setidaknya membuktikan pemohon mempunyai itikad baik untuk mendaftarkan merek dalam upaya memperoleh perlindungan hukum.

c. **Posisi kasus**

SYAHRIL, seorang pengusaha pakaian jadi yang beralamat di JL. Wuni I/955 Tegalreja Cilacap Selatan, mengajukan pendaftaran merek dagang "KEZO". Merek ini ditolak oleh kantor merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek KENZO dari Perancis. Pendaftaran merek dilakukan atas kuasa dari Fakultas Hukum Untag Semarang.

TAMBAH HARTATI, seorang pengusaha krupuk ikan tengiri, dengan alamat Jl. Kendeng no.17 Cilacap mengajukan pendaftaran merek dagang “ CITA RASA “ .Permohonan pendaftaran merek ini juga ditolak oleh kantor merek karena untuk merek tersebut telah terdaftar atas nama seorang pengusaha dari Surabaya.

d. **Advis Hukum**

Pendaftaran merek pada dasarnya melalui beberapa tahap,yaitu pemeriksaan formal,pemeriksaan substansi, publikasi, penerimaan atau penolakan. Fase yang penting lainnya yang tidak tersebut dalam prosedur permohonan pendaftaran adalah searching atau pemeriksaan awal mengenai sudah atau belum digunakannya merek yang akan didaftarkan. Fase ini memang dikenakan biaya resmi Rp. 125.000 per permohonan merek, namun demikian dapat memberikan manfaat yang amat besar sebab dengan biaya tersebut di atas seorang pemohon dapat menghemat biaya resmi pendaftaran( Rp. 450.000) seandainya diketahui merek tersebut telah terdaftar atas nama orang lain, daripada melakukan pendaftaran langsung tanpa melakukan searching terlebih dulu.Penolakan permohonan pendaftaran merek biasanya disertai dengan alasan penolakannya.Dengan demikian apabila pemohon bermaksud mendaftarkan ulang dapat dilakukan dengan mengubah atau mengganti dengan yang

lain, walaupun itu bukan merupakan hal yang mudah untuk urusan merek yang telah terlanjur dipasarkan.

#### 4. KABUPATEN WONOSOBO

*Wawancara dengan ANDI ANDRIANI ACHMAD,SE, Kasubdin Industri, kantor Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Wonosobo, Jum'at 30 September 2001.*

##### a. Posisi Kasus

NY.Sri Sutarti dengan alamat Manggisian asri Mudal RT 01 RW 04 Mojotengah Wonosobo adalah produsen sirop dan jus buah dengan merek CARICA, merek ini sudah dikenal dikalangan konsumen di daerah Wonosobo dan sekitarnya. Tanggal 31-8-2000 pemilik merek mendaftarkan mereknya melalui kantor Kanwil Kuandang di Semarang dengan nomor agenda penerimaan D09.2001.00016. Di pasaran akhir-akhir ini banyak dijumpai produk yang sama dengan merek CARICA dengan sedikit sekali perbedaan dengan merek yang dimiliki Ny.Sutarti. terakhir diketahui produk yang mirip tersebut milik SOEGIHARTO dengan alamat JL.Resimen 18 No.107 Wonosobo.Pemilik asli merek CARICA melaporkan kejadian ini pada kantor perindag setempat bahkan berniat melaporkan hal tersebut pada aparat kepolisian di Wonosobo.

##### b. Advis Hukum

Terhadap para pihak telah dicapai kesepakatan sementara untuk menahan diri, sambil menunggu kepastian dari Kantor Merek di

Jakarta mengenai diterima atau ditolaknya permohonan pendaftaran merek CARICA atas nama Ny.Sutarti. Dengan kemungkinan apabila pendaftaran mereknya diterima maka akan berakibat Ny.Sutarti adalah pemilik yang sah atas merek CARICA yang mempunyai hak penuh melarang orang lain menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek miliknya. Dengan demikian dapat berakibat tidak boleh digunakannya merek Carica oleh pesaing usahanya dalam hal ini SOEGIHARTO . Dalam hal ini telah diinformasikan bahwa pesaing usaha telah mempunyai iktikat tidak baik meniru merek milik orang lain yang dapat berakibat dikenakannya tindakan pidana atau perdata atas pelanggaran tersebut. Namun apabila permohonan pendaftaran merek CARICA atas nama Ny. Sutarti ditolak dikemudian hari oleh kantor merek di Jakarta maka sangat sulit bagi Ny.sutarti melaporkan telah terjadinya pelanggaran merek oleh pihak lain, karena prinsip hokum merek hanya melindungi merek yang didaftarkan. Satu-satunya kemungkinan hanya mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas kerugian yang timbul sebagai akibat ditirunya merek oleh pihak lain.

## 5. KABUPATEN PEMALANG

*wawancara dengan SUMARTANA, Bsc, Kasubdin Bina Industri, Kantor Dinas Perindagkop Kabupaten Pemalang, Kamis 4 Oktober 2001.*

### a. Posisi Kasus

Seorang yang tidak disebutkan namanya menawarkan barang dagangannya berupa celana panjang ke kantor Kepolisian Resort Pemalang. Maksud hati memperoleh calon pembeli atas barang dagangan tersebut ternyata berbuntut panjang menjadi perkara pidana. Pihak calon pembeli yang terdiri dari para polisi tersebut ternyata melakukan tindakan diluar perkiraan karena mereka menyita barang dagangan tersebut dengan alasan telah terjadi pelanggaran merek celana panjang dengan merek CARDINAL. Dengan dalih terjadinya pemalsuan merek tersebut si pedagang ditahan sementara waktu di mapolres Pemalang berserta barang buktinya. Tidak sampai disitu, polisi kemudian mengembangkan temuan tersebut kepada orang yang menjadi pengusaha/pengrajin konveksi tersebut yang terakhir diketahui bernama MASRUL. Atas laporan tersebut Polisi melakukan pengeledahan dan menyita beberapa barang bukti celana dengan merek CARDINAL. Untuk sementara waktu MASRUL terpaksa harus bermalam di Mapolres karena tuduhan pemalsuan merek. Namun demikian dengan negosiasi, MASRUL malam itu dapat dibebaskan dengan sejumlah uang jaminan. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena dianggap masih ada pihak lain yang terlibat, yaitu EDWIN, sang pemasok merek CARDINAL beberapa

pengusaha/pengrajin celana panjang di pemalang. Untuk perbuatannya EDWIN terpaksa berurusan dengan pihak aparat kepolisian Pemalang serta untuk sementara waktu ia harus menginap di mapolres Pemalang. Namun lagi-lagi dengan negosiasi dapat dicapai kesepakatan untuk mengeluarkan EDWIN dengan uang jaminan.

**b. Advis Hukum**

Peristiwa ini sungguh luar biasa ditinjau dari kacamata hukum merek. Tampak sekali dengan kewenangan yang dimiliki Polisi serta kepandaianya dapat memainkan sebuah sandiwara pelanggaran merek di atas ketidak tahuan pengrajin atau pengusaha konveksi. Pelanggaran yang diancam dengan pidana dalam pelanggaran merek adalah delik aduan, yang artinya untuk terjadinya penyelidikan atau penyidikan sangat tergantung pada adanya pengaduan dari *pemilik merek yang sah*, yang harus dibuktikan dengan adanya sertifikat merek dari kantor merek sebagai bukti telah didaftarkannya merek tersebut, atau pengaduan tersebut dapat juga dilakukan oleh *pemegang lisensi* dari pemilik merek yang dibuktikan dengan adanya surat perjanjian lisensi antara pemilik merek dengan Licensor/penyewanya. Dalam perjanjian lisensi pun harus masih diselidiki apakah lisensi itu eksklusif atau non eksklusif sebab kemungkinan besar hanya pada lisensi yang eksklusif saja pemegang lisensi dapat melakukan tindakan pengaduan adanya pelanggaran merek, tanpa itu tidak dapat dilakuakn penyelidikan atau pun penyidikan adanya

pelanggaran merek. Dalam kasus di atas sangat luar biasa karena tidak ditemukan bukti resmi adanya pengaduan dari pemilik merek CARDINAL ataupun adanya pengaduan dari pemegang lisensi merek CARDINAL sebagai dasar untuk adanya tuduhan pelanggaran merek. Tampak sekali dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki polisi telah berhasil memanfaatkan ketidak tahuan pengusaha/pengrajin konveksi. Dengan demikian upaya sekian tahun untuk menumbuhkembangkan UKM yang dilakukaj oleh pemerintah menjadi sia-sia. Memang kebiasaan pengusaha kecil/menengah untuk melakukan bisnis dengan mendompleng reputasi pihak lain yang sudah terkenal telah terlanjur terbiasa dilakukan dan itu memang merupakan pelanggaran. Namun perlu diingat bahwa semuanya telah diatur dengan UU dan terdapat mekanisme yang harus dipenuhi sebagai persyaratatnya.

Alternatif yang diusulkan Klinik HKI adalah melakukan semacam dialog yang mempertemukan berbagai pihak terkait seperti halnya : Kepolisian, Depkeh (dalam hal ini bagian jasa hukum yang melayani registrasi merek ), Akademisi (Klinik HKI Fak Hukum UNDIP sebagai mediator yang netral ), pakar hukum Pidana, Pengusaha/Pengrajin konveksi. Dalam acara tersebut diharapkan dapat menyamakan persepsi yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya agar tidak saling curiga dan merugikan. Sebab penegakan hukum yang dilakukan dengan tidak

pelanggaran merek. Dalam kasus di atas sangat luar biasa karena tidak ditemukan bukti resmi adanya pengaduan dari pemilik merek CARDINAL ataupun adanya pengaduan dari pemegang lisensi merek CARDINAL sebagai dasar untuk adanya tuduhan pelanggaran merek. Tampak sekali dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki polisi telah berhasil memanfaatkan ketidak tahuan pengusaha/pengrajin konveksi. Dengan demikian upaya sekian tahun untuk menumbuhkembangkan UKM yang dilakukaj oleh pemerintah menjadi sia-sia. Memang kebiasaan pengusaha kecil/menengah untuk melakukan bisnis dengan mendompleng reputasi pihak lain yang sudah terkenal telah terlanjur terbiasa dilakukan dan itu memang merupakan pelanggaran. Namun perlu diingat bahwa semuanya telah diatur dengan UU dan terdapat mekanisme yang harus dipenuhi sebagai persyaratannya.

Alternatif yang diusulkan Klinik HKI adalah melakukan semacam dialog yang mempertemukan berbagai pihak terkait seperti halnya : Kepolisian, Depkeh (dalam hal ini bagian jasa hukum yang melayani registrasi merek ), Akademisi (Klinik HKI Fak Hukum UNDIP sebagai mediator yang netral ), pakar hukum Pidana, Pengusaha/Pengrajin konveksi. Dalam acara tersebut diharapkan dapat menyamakan persepsi yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya agar tidak saling curiga dan merugikan. Sebab penegakan hukum yang dilakukan dengan tidak



menyelesaikan persoalan ini dengan melaporkan kejadian ke Perindag setempat. Berdasarkan pertemuan antara para pihak terdapat fakta bahwa ternyata merek BUKUR sedang dalam proses pendaftaran merek di Jakarta dengan bulan pendaftaran pada bulan Mei, sedangkan merek TIGA BUKUR juga sedang dalam tahap permohonan pendaftaran pada bulan Juni. Dengan demikian terdapat fakta bahwa merek BUKUR telah mendaftarkan lebih dulu daripada merek TIGA BUKUR, dengan selisih waktu hampir 1 bulan.

**c. Advis Hukum Merek**

Pada kasus yang pertama maka penyelesaian sengketa HKI pada umumnya berdasarkan ketentuan UU Merek No.14 tahun 2001 tidak harus diselesaikan melalui jalur Pengadilan akan tetapi dapat diselesaikan melalui ADR atau alternative dispute resolution, artinya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan berbagai alternatif penyelesaian, salah satunya dengan jalan Mediasi. Yaitu menunjuk pihak lain yang dianggap netral untuk dapat sebagai mediator menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi. Dengan demikian maka Perindagkop dapat sebagai jembatan menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah. Namun demikian, sebagai langkah selanjutnya secara hukum maka suatu merek baru akan dilindungi apabila dimintakan pendaftaran maka alangkah baiknya apabila merek KAPAL LAYAR mendaftarkan merek tersebut di

Kantor merek. Pendaftaran merekpun saat ini telah dipermudah dengan dapat melakukan pendaftaran melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman di Propinsi, tanpa harus ke Jakarta. Untuk itu dapat dilakukan sendiri ataupun melalui kuasa.

Pada kasus kedua, mengingat merek BUKUR, yang dianggap meniru telah mendaftarkan terlebih dahulu daripada merek TIGA BUKUR, yang baru kemudian mendaftar maka alternatif yang dapat dilakukan adalah melakukan KEBERATAN secara tertulis pada saat fase pengumuman dilakukan untuk permohonan pendaftaran merek BUKUR, keberatan tertulis itu diajukan pada Ditjen HKI di Jakarta karena itu merupakan hak siapapun yang merasa keberatan atas adanya permohonan pendaftaran merek. Dengan keberatan itu dapat dilampiri bukti-bukti bahwa ia adalah pemilik yang sah dari merek yang akan dimintakan pendaftaran, dan ini akan dijadikan sebagai bahan kantor merek untuk melakukan penolakan bila keberatan diterima oleh kantor merek.

## 8. Kabupaten KUDUS

*Wawancara dengan Nor Jaman, Kasi Bina Industri Kantor Dinas Perindustrian dan perdagangan koperasi Kabupaten Kudus, 1 Nopember 2001.*

### a. Posisi Kasus

Seorang pengusaha yang tidak mau disebut namanya, memproduksi sirup dan gula asam dengan menggunakan merek MULIASARI. Merek ini masih dalam

tahap pendaftaran di kantor merek di Jakarta. Akhir-akhir ini produk muliasari banyak ditiru oleh pengusaha lain yang belum jelas alamat pengusahanya. Pemilik merek MULIASASRI ingin melakukan tindakan dan melaporkan adanya pelanggaran merek pada aparat penegak hukum. Akan tetapi, dalam kenyataanya pemilik merek MULIASASRI juga melakukan pelanggaran yang lebih besar atas merek dan kemasan milik pengusaha lain, dikarenakan pemilik merek muliasasri secara sengaja menggunakan kemasan botol bekas dengan merek the SIPP serta botol bekas milik The SOSRO untuk produknya tanpa ada ijin serta tidak menghilangkan tanda merek tersebut, artinya hanya dengan menutup merek SIPP atau merek SOSRO dengan merek MULIASASRI untuk produk minumannya.

#### **b. Advis Hukum**

Disarankan pemilik merek MULIASARI untuk segera mengakhiri praktek bisnis dengan melanggar HKI pihak lain sebab dapat berakibat gulung tikarnya perusahaan apabila pemilik merek yang sah merasa tidak terima atas terjadinya pelanggaran tersebut. Cepat atau lambat pengusaha dari pemilik merek yang sah akan mengetahui peristiwa ini. Terlebih lagi perusahaan yang dilanggara HKInya adalah perusahaan yang besar dengan manajemen profesional serta cukup dana untuk menyelesaikan segala bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan reputasi perusahaan. Namun demikian tindakan pendaftaran merek yang dimiliki oleh MULIASARI merupakan upaya yang baik dalam rangka melindungi produknya namun demikian harus segera diupayakan menghindarkan diri dari penggunaan kemasan bekas milik pengusaha lain.

Penanganan terhadap pelanggaran merek muliasasri pada dasarnya baru dapat dilakukan apabila telah ada kepastian mengenai diterimanya permohonan pendaftaran merek miliknya, sebab hukum merek baru dapat ditegakkan apabila terjadi pendaftaran dan diterima oleh Kantor Merek di Jakarta.

### BAB III

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. KESIMPULAN

1. Produk unggulan yang dimiliki oleh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah ternyata sangat beragam dan jumlahnya sangat banyak. Produk unggulan Jawa Tengah yang dibantu biaya pendaftaran mereknya adalah produk yang betul – betul unggulan di masing – masing kabupaten /kota di Jawa Tengah. Kriteria produk unggulan setidaknya-tidaknya mencakup 5 aspek, yaitu :

#### ➤ TEKNOLOGI

Dari aspek ini produk unggulan yang dihasilkan sangat diutamakan yang menggunakan teknologi tepat guna yang tidak terlalu sulit untuk memperbaikinya jika mengalami kerusakan di samping dari hasilnya tidak kalah dengan mesin yang berteknologi canggih juga lebih murah dalam pembiayaan operasinya.

#### ➤ PASAR

Pasar adalah tempat di mana produk unggulan Jawa Tengah dijual. Pemasaran mempunyai kunci yang penting untuk menentukan hidup matinya atau maju tidaknya suatu usaha. Produk yang bagus akan tidak mempunyai arti jika tidak bisa dipasarkan. Kerugian yang muncul karena tidak dapatnya suatu produk dipasarkan akan memberi dampak kerugian yang bersifat ikutan yang akan saling menyeret sehingga kerugian yang diderita secara kumulatif akan sangat

merugian, tidak hanya pada pengusaha, pekerja, penyedia bahan baku tetapi juga pemerintah daerah.

#### ➤ KETERSEDIAAN BAHAN BAKU

masalah ketersediaan bahan baku. Kemudahan memperoleh bahan baku menjadi pertimbangan utama masuk tidaknya suatu produk ke dalam kriteria unggulan. Hal ini terkait erat dengan keberlangsungan proses produksi yang juga berarti keberlangsungan kehidupan buruh dan keluarganya dan yang tidak kalah penting kontribusi pada pemerintah daerah yang tidak kecil juga akan berlangsung terus.

#### ➤ SUMBERDAYA MANUSIA

Kriteria unggulan berikutnya terkait dengan aspek SDM. Sumberdaya manusia dalam suatu perusahaan merupakan motor penggerak roda perusahaan, semakin baik sumberdaya manusia yang menjalankan perusahaan dapat diharapkan kemajuan yang akan dicapai oleh perusahaan itu akan semakin besar. Sebaliknya jika sumberdaya manusia yang menjalankan roda perusahaan mempunyai kategori rendah maka perkembangan perusahaan itu akan tersendat – sendat. Penggunaan SDM setempat perlu dipertimbangkan dengan sungguh – sungguh mengingat dengan diberlakukannya UU Otonomi Daerah maka daerah diharapkan mampu mencukupi kebutuhan hidup warganya termasuk kebutuhan akan lapangan pekerjaan. Hal ini sangat dimungkinkan sepanjang calon tenaga kerja mempunyai kapasitas yang dibutuhkan.

➤ CIRI KEDAERAHAN

Produk unggulan yang dibantu biaya pendaftaran mereknyautamakan yang mampu menunjukkan ciri kedarahan dengan jelas sehingga dapat juga berfungsi sebagai pengenalan/merek bagi suatu daerah. Produk yang mempunyai ciri kedaerahan yang khas lebih mudah memberikan perlindungan HKInya karena dari produk tsb sudah terlihat darimana asalnya. Sebagai produk yang mempunyai ciri khas bagi daerahnya dapat diprediksi dengan mudah untuk keberlangsungan produksinya dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan bahan baku.

➤ RAMAH LINGKUNGAN

Langkah yang sangat bijaksana memasukkan aspek kelestarian lingkungan dalam kriteria unggulan atas suatu produk yang dihasilkan suatu daerah. Harus dipahami betul pemanfaatan SDA antara yang dapat diperbaharui (*renewable*) dan yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*) harus ditangani secara berbeda. Masalah dampak negatif berupa pencemaran /perusakan lingkungan juga harus menjadi dasar dalam memilih bahan baku guna mendukung proses produksi.

2. Dari 70 produk unggulan daerah yang dibantu biaya pendaftarannya untuk memperoleh perlindungan hukum bidang HKI ternyata 69 berupa merek sedangkan 1 produk unggulan berupa paten sederhana. Bentuk produk yang

dimintakan paten sederhana tersebut adalah mesin perajang tembakau yang berasal dari Kabupaten Temanggung.

3. Dari hasil identifikasi kasus yang terjadi sebagian besar sengketa menyangkut pemalsuan merek baik merek yang sudah terdaftar maupun yang belum, tetapi kebanyakan merek yang belum terdaftar. Kesulitan yang dihadapi oleh pihak pemilik merek yang belum didaftarkan tetapi sudah dipalsukan oleh pihak lain adalah masalah pembuktian hukum bahwa merek itu betul betul miliknya.

## **B. REKOMENDASI**

1. Hasil identifikasi ini memberikan gambaran yang jelas bahwa di Jawa Tengah begitu banyak memiliki produk produk unggulan yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Suatu hal yang ironis begitu banyaknya produk unggulan dimiliki tetapi dari aspek perlindungan hukum HKInya tidak ada. Sejalan dengan semangat otonomi daerah maka harus ada upaya memberikan perlindungan hukm yang maksimal terhadap produk unggulan daerah yang merupakan sumber pendapatn dari suatu daerah. Oleh Karena itu kegiatan semacam ini perlu ditindak lanjuti dengan membuat pos anggaran tetap untuk memberikan perlindungan hukum khususnya bidang HKI baik ditingkat Pemerintah Propinsi maupun kabupaten/kota dengan mengalokasikan dalam APBD setiap tahunnya.
2. Identifikasi juga menunjukkan lemahnya jalinan komunikasi antara KLINIK HKI Fakultas Hukum Undip dengan Deperindag di seluruh Jawa Tengah dan dengan para pelaku usaha khususnya UKM yang masih banyak memerlukan



## DAFTAR REFERENSI

H.Djoko Sudantoko, S.Sos.MM., *Kebijakan HKI di Propinsi Jawa Tengah*, Diskusi Panel HKI Yang diselenggarakan oleh LPM-UNDIP-LPM -UNES, Semarang 27 Oktober 2001

Ms. Susan Farquhar, Director External Relations, IP Australia, *Development of Small and Medium-Sized Enterprises and Venture Business by means of Intellectual Property*, Apec Symposium on Intellectual Property Rights, Keio Plaza Hotel Japan, February 28 March 2000.

Ms. Lorna Patajo-Kapunan, Managing Partner Roco Bunag Kapunan & Migallos Law Offices Philippines, *The role of Intellectual Property Right Systems in supporting Small and medium Sized Enterprises and Venture Businesses*, APEC/ABAC Joint Symposium on Intellectual Property Rights, Rihga Royal Hotel Kokura Kitakyushu, Fukuoka Japan, February 22-24 1999.

Ir. Ori Timbul Hartonegoro, *Pola Pembinaan HKI*, Seminar Sehari Pemahaman Prosedur Kepemilikan HKI bagi Pelaku Dunia Usaha, Semarang 27 Oktober 2001.

Nashir Budiman., *HKI sebagai asset intelektual dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah*, Bunga Rampai HKI, Kumpulan Esai, Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia (IIPS), Jakarta 2001.

-----, *Produk Unggulan Daerah Propinsi Jawa Tengah*, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah 2000.

Moh. Nazir, Ph.D., *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia Jakarta 1985.

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi., *Metode Penelitian Survei*, LP3ES 1989.